**EVALUASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK TENTANG PROGRAM PEMANTAPAN PEMAHAMAN WAWASAN KEBANGSAAN DI KABUPATEN MAJALENGKA**

Oleh :

**Hj. Tati Hartati, Dra, M.Si.**

**ABSTRAK**

*Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Majalengka adalah sebagai pelaksana Permendagri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan. Fenomena Permendagri Nomor 71 Tahun 2012 di Kabupaten Majalengka ditinjau dari pelaksanaan program Pemantapan Pemahaman Wawasan Kebangsaan yang diselenggarakan oleh Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Majalengka berkerjasama dengan Kodim 0617 Majalengka serta Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka.*

*Program Pemantapan Pemahaman Wawasan Kebangsaan ini sangatlah penting mengingat perkembangan Era Globalisasi, Masyarakat Ekonomi Asean yang diiringi dengan AFTA ( Pasar Bebas Kawasan Asia Tenggara) tidak luput pula permasalahan – permasalahan Disintegrasi Bangsa Indonesia yang akhir-akhir ini bermunculan dan berkembang dengan luas merupakan suatu kewajiban bagi penyelenggara Negara memberikan pelayanan publik untuk memberikan wawasan agar masyarakat dapat memahami serta mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari sebagai benteng diri dari sagala bentuk disintegrasi bangsa.*

*Tujuan dari penelitian ini untuk mengevaluasi, menguraikan, menggambarkan serta menganalisis suatu fenomena impelementasi kebijakan publik yang berkembang dalam masyarakat dengan cara mendepenelitiankan bagaimana Permendagri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan dengan menyelenggarakan Pendidikan Wawasan Kebangsaan, Pembentukan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan serta Pembinaan dan Pengawasan.*

*Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, maka dalam pemilihan informen peneliti menggunakan cara sample tujuan (purposeful sample). Adapun teknik yang digunakan peneliti dalam pengumpulan data adalah studi kepustakaan, observasi, wawancara dan dokumentasi.*

*Hasil penelitian ini memperlihatkan masih kurangnya sosialisasi pelaksanaan program secara menyeluruh, kemudian keterbatasan anggaran, serta terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) sehingga sulit untuk dapat melayani masyarakat luas. Penelitian ini membuat peneliti mengerti betapa sulitnya mengukur dalam pembangunan makro, dengan adanya Permendagri Nomor 71 Tahun 2012 ini sebagai pemicu agar senantiasa mengingatkan kembali nilai-nilai bangsa yang dirasa telah luntur di masyarakat dibutuhkan kerjasama yang sinergi dengan pihak lain untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki jiwa nasionalisme, cinta akan tanah air dan bangsa Indonesia.*

Kata Kunci : Evaluasi Kebijakan, Wawasan Kebangsaan.

**PENDAHULUAN**

Nilai-nilai Kebangsaan Bangsa Indonesia dalam kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara dewasa ini dirasakan semakin menurun, hal ini disebabkan oleh adanya pengaruh arus perubahan dan tranformasi sebagai akibat (dampak) dari globalisasi dunia, negara-negara modern terhadap negara - negara berkembang termasuk dalam hal ini negara kita Republik lndonesia.

Rasa Kebangsaan atau Nasionalisme pada masyarakat Indonesia saat ini menunjukkan indikasi yang semakin pudar,

1. Survey Media Group pada tanggal 1 Nopemeber 2007 tentang persepsi

masyarakat Indonesia terhadap Malaysia, 48 % mempersepsikan sebagai ancaman, 34 % sebagai sahabat, 18 % tidak memberikan jawaban. Sedangkan perasaan publik terhadap Malaysia, 65 % biasa-biasa saja, hanya 25 % yang mengatakan tidak suka, 10 % tidak memberikan jawaban. Survei yang dilakukan oleh Media Group dilatarbelakangi oleh keadaan dan situasi yang berkembang dalam masyarakat di sebagian besar wilayah Republik Indonesia yang memberikan reaksi terhadap sikap Malaysia yang mengklaim beberapa karya budaya masyarakat Indonesia sebagai karya budaya Malaysia, seperti batik dan tarian reog.

1. Penelitian oleh Lemhannas tahun 2007 mengungkapkan tentang

bagaimana sikap dan perilaku masyarakat di daerah penelitian berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat, berpolitik dan bernegara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran ideologi dalam kehidupan bermasyarakat rendah, dalam kehidupan berpolitik cukup dan tinggi dalam kehidupan bernegara. Selanjutnya diungkapkan bahwa peran agama dalam kehidupan bermasyarakat tinggi, dalam kehidupan berpolitik cukup dan dalam kehidupan bernegara peran rendah.

Hasil survei yang dilakukan oleh Media Group, juga menunjukkan sesuatu yang tidak sama antara persepsi tentang ancaman dengan perasaan tidak suka terhadap Malaysia. Adanya ketidaksamaan peran agama dan ideologi dalam kehidupan bermasyarakat, berpolitik dan bernegara dan antara persepsi sebagai ancaman dengan perasaan tidak suka terhadap Malaysia sebagaimana yang diungkapkan di atas, jelas memberikan indikasi kuat bahwa pada masyarakat kita terjadi apa yang disebutkan sebagai pudarnya rasa nasionalisme sebagai bangsa. Hal yang serupa juga ditunjukkan dari hasil penelitian di atas, mengindikasikan bahwa terjadi perbedaan yang signifikan antara peran agama dibandingkan dengan peran ideologi dalam kehidupan bermasyarakat, berpolitik dan bernegara, yang seharusnya berjalan paralel, karena ideologi dan agama dalam falsafah Ideologi Pancasila tidak dapat dipisahkan. Agama dalam Ideologi Pancasila adalah merupakan roh (sila I Ketuhanan Yang Maha Esa) untuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam negara kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu mengatakan pada. Wawasan Kebangsaan atau Bela Negara Bangsa Indonesia terlalu rendah.  
Berdasarkan survei masalah Wawasan Kebangsaan yang dilakukan di 106 negara, Indonesia menempati urutan ke-95.

Untuk menangkal pengaruh-pengaruh negatif kepada masyarakat Bangsa Indonesia baik diperkotaan maupun di daerah sampai pada pelosok pedesaan. Maka perlu adanya pendidikan wawasan kebangsaan secara komprehensip, terpadu dan berkesinambungan sebagai upaya untuk meningkatkan kembali pemahaman nilai-nilai kebangsaan kepada masyarakat dan generasi muda.

Program Pemantapan Pemahaman Wawasan Kebangsaan merupakan perwujudan implementasi dari Permendagri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan menyebutkan Wawasan Kebangsaan adalah :

“Cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Selanjutnya di kembangkan Sebagaimana amanat Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Daerah Bagian Keempat Urusan Pemerintahan Umum Pasal 25 ayat (1) Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) butir pertama menyebutkan bahwa :

“Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Program Pemantapan Pemahaman Wawasan Kebangsaan merupakan implementasi dari produk Kebijakan Publik Pemerintah, dimana pemerintah sebagai *public servent* dituntut untuk melayani masyarakat secara optimal kepada. Seiring dengan terjadinya reformasi politik pemerintahan yang ditandi dengan penerapan sistem pemerintahan berdasarkan otonomi daerah, terjadi pula pergeseran paradigma dalam pelaksanaan program PWK di Daerah Provinsi, Kabupaten / Kota.

Masalah Wawasan kebangsaan merupakan masalah yang berhubungan dengan nilai – nilai perjuangan Bangsa Indonesia yang merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia serta menghasilkan rumusan dasar – dasar Negara yang mana tercantum dalam empat konsensus berbangsa dan bernegara Indonesia yaitu Pancasila, UUDRI 1945, Bhineka Tunggal Ika, NKRI, yang merupakan aspek – aspek kehidupan konsepsi Ketahanan Nasional, aspek – aspek tersebut yaitu Geografi, Demografi, Kekayaan alam (Tri Gatra) / aspek alamiah dan Idioligi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Pertahanan dan Keamanan (Panca Gatra) / aspek sosial.

Pada masalah pendidikan, dalam keluarga pendidikan nilai – nilai Wawasan Kebangsaaan untuk mendidik anak – anaknya berkarakter moral maupun intelektual belum dapat mencakupi dikarenakan setiap keluarga memliki latar belakang yang berbeda – beda tidak hanya itu jikalau dalam satu keluarga menerapkan nilai – nilai wawasan kebangsaan lingkungan luarpun dapat mempengaruhi pembentukan karakter seorang anak yang akan tumbuh berkembang menjadi dewasa. Maka perlu adanya peran pemerintah untuk membentuk baik karakter / moral maupun intelektual terhadap masyarakat.

Masalah paradigma yang berkembang pada saat ini dimana arus globalisasi sangat mempengaruhi dalam kehidupan sehari – hari yang berupa isu – isu kebijakan publik MAE, AFTA yang akan dimulai pada akhir tahun 2012 ini. Kondisi ini merupakan kondisi yang memerlukan kerja keras bagi pemerintah agar dapat bersaing secara terbuka dengan bangsa – bangsa lain untuk mempersiapkan masyarakat agar dapat menjadi bangsa yang maju dan memiliki daya saing untuk menghadapi itu semua yang mana ada sisi positif maupun negativ dari hal – hal tersebut.

Masalah stabilitas keamanan dewasa ini sangat memprihatinkan yang dialami bangsa Indonesia dengan munculnya tindakan – tindakan Kriminal, Narkoba, Film – film porno, ajaran - ajaran sesat berkedok agama, radikalisme, terorisme, saparatisme, liberalisme merupakan tindakan disintegrasi bangsa tentu sangat bembahayakan kedaulatan negara dan keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa merupakan hal yang sangat tidak menguntungkan bagi pemerintah karena akan menghambat laju pembangunan.

Selain itu pentingnya Wawasan Kebangsaan untuk ditanamkan dalam diri Masyarakat dengan harapan, kehidupan Bangsa Indonesia ke depan jauh menjadi lebih baik dan lebih harmonis. Selain itu semangat Kebangsaan ini harus dimiliki seluruh anak bangsa untuk bangkit mempersiapkan dan mengembangkan diri demi masa depan bangsa dan negara.

Upaya membangun wawasan kebangsaan ke depan tentu menjadi tugas bersama dalam membangkitkan spirit kelompok masyarakat. Terutama menghadapi Era Globalisasi yang sekarang lebih banyak masukan-masukan dari luar dan bisa mempengaruhi generasi muda kita. Selain itu pengaruh radikalisme berkedok Agama, faham – faham yang sesat dan tidak sesuai dengan idiologi bangsa Indonesia dan kenakalan remaja yang akhir – akhir ini meresahkan.

Pengaruh tersebut pernah menjadi catatan buruk bagi Kabupaten Majalengka yang kita ketahui beberapa tahun kebelakang pelaku bom Bali dua yaitu warga Kabupaten Majalengka, selanjutnya beberapa pemuda di Kabupaten Majalengka tewas dikarenakan minuman keras oplosan, dari dua kasus tersebut menjadi topik hangat di media lokal, Nasional bahkan media Internasional, selain itu untuk menghadapi pembangunan di Kabupaten Majalengka itu sendiri yang sedang berjalan pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) yang mana tidak hanya sampai di situ saja namun akan menjadikan Majalengka sebagai kota metropolitan yang mana akan berdatangan penduduk luar Majalengka baik dalam maupun luar negri yang tentu akan berdampak luas terhadap tatanan kehidupan sosial budaya masyarakat Majalengka atas dasar itu pendidikan wawasan kebangsaan di Kabupaten Majalengka sebagai sarana untuk mencegah dampak – dampak yang buruk serta mempersiapkan diri untuk menghadapi perkembangan tersebut.

Dengan demikian salah satu upaya untuk mencapai tujuan tersebut Pemerintah Daerah melalui Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Majalengka mengimplementasikan kebijakan pemerintah pusat dengan melaksanakan kegiata Program Pematapan Pemahaman Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Majalengka.

Pelaksanaan rangkaian kegiatan dalam Organisasi dilakukan oleh Manusia yang bertindak sebagai aktor atau peserta dalam Organisasi yang bersangkutan. Agar organisasi tersebut dapat berjalan dengan hasil yang diharapkan diperlukan evaluasi guna menilai sejauh mana keberhasilan program tersebut dilaksanakan agar dapat memberikan gambaran bilamana adanya kekurangan serta merencanakan pengembangan selanjutnya.

Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Majalengka yang merupakan bagian atau sub sistem dari Sistem Birokrasi Negara. Beraneka ragamnya tugas-tugas dan kewajiban Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Majalengka sebagai perwujudan dari sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan negara, menuntut pula kepada semua Aparat Birokrasinya untuk melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepada mereka dengan melaksanakan program Pendidikan Wawasan Kebangsaan terhadap masyarakat Kabupaten Majalengka, dalam hal ini program Pemantapan Wawasan Kebangsaan yang tiap tahunnya dilaksanakan.

Ada beberapa permasalahan yang ditemukan di lapangan berdasarkan observasi dan wawancara awal / penjajakan dengan indikator – indikator sebagai berikut :

1. Keterbatasan tenaga staf (Sumber Daya Manusia Pegawai Kantor

Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majalengka) sehingga belum dapat optimal pelayanan terhadap Masyarakat.

2. Bermunculan faham – faham terorisme, radikalisme, libralisme, saparatisme,

kenakalan remaja serta globalisasi yang dapat pempengaruhi tatanan kehidupan

masyarakat yang berpedoman pada empat konsensus berbangsa bernegara Indonesia.

1. Pembangunan Bandara Internasional Kertajati, akan merubah Kabupaten Majalengka menjadi Kota Mertopolitan.
2. Masyarakat kurang mendapatkan Pendidikan Wawasan Kebangsaan baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan luar tempat tinggal.

5. Pembentukan Wawasan Kebangsaan pada dasarnya dapat dipengaruhi oleh

banyak faktor yang sangat terkait baik yang berasal dari dalam diri (internal) maupun dari luar diri (eksternal). Pada hakikatnya tidak ada faktor tunggal yang secara otomatis mempengaruhi pembentukan wawasan kebangsaan..

Berdasarkan uraian dan gejala – gajala tersebut di atas, penyusun merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam yang penyusun tuangkan dalam bentuk penelitian dengan judul : “EVALUASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK TENTANG PROGRAM PEMANTAPAN PEMAHAMAN WAWASAN KEBANGSAAN DI KABUPATEN MAJALENGKA”.

**Rumusan Masalah**

Evaluasi adalah suatu upaya untuk melakukan analisis dan penilaian terhadap pelaksanaan suatu program berdasarkan pada informasi yang diperoleh dari hasil monitoring maupun dari sumber lain. Melalui kegiatan evaluasi dapat diketahui sejauh mana pelaksanaan Program Pemantapan Pemahaman Wawasan Kebangsaan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penyusun dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Program Pemantapan Pemahaman Wawasan Kebangsaan yang diselenggarakan oleh Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Majalengka.

2. Bagaimana evaluasi Program Pemantapan Pemahaman Wawasan Kebangsaan

yang diselenggarakan oleh Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Majalengka

**Tujuan**

Berdasarkan perumusan masalah di atas maka diperlukan tujuan penelitian karena tanpa ada tujuan yang jelas, maka penelitian akan mengalami kesulitan. Sesuai latar belakang rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian yaitu Mengevaluasi Implementasi Program Pemantapan Pemahaman Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Majalengka.

**TINJAUAN PUSTAKA**

**Hubungan Administrasi Negara Dengan Wawasan Kebangsaan**

Sejauh ini tentang wawasan kebangsaan masih kurang diperhitungkan manfaat dan kegunaannya menjadi bagian dari studi ilmu administrasi khususnya ilmu administrasi negara. Adminstrasi negara bukan suatu hal yang baru, karena administrasi Negara itu sendiri pada dasarnya lahir bersaman dengan adanya negara. Oleh karena itu administrasi negara lahir berkembang bersamaan dengan perkembangan negara tersebut.

Pernyataan tersubut sama seperti halnya wawasan kebangsaan yang tidak bersifat statis melainkan bersifat dinamis seperti pendapat Susilo Bambang Yudhoyono :

“Wawasan kebangsaan bukanlah sesuatu yang bersifat statis dan tak berubah dari waktu ke waktu, sebaliknya ia bersifat dinamis. Namun bukan berarti juga wawasan kebangsaan tersebut dapat diubah-ubah sekehendaknya. Seperti halnya membangun suatu rumah tangga, ada bagian yang tidak mudah untuk diubah dan ada bagian yang relatif mudah berubah”. (Yudhoyono, 2004).

Banyak pengertian – pengertian administrasi negara menurut pada ahli,namun disini penyusun menyimpulkan administrasi negara ialah proses keseluruhan kerja sama lembaga-lembaga Negara yaitu eksekutif, legislatif, yudikatif beserta seluruh lembaga-lembaga lainnya di luar pemerintahan untuk mencapai tujuan negara tersebut dalam hal ini negara Indonesia mempunyai tujuan atau cita-cita yang tertuang dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada alinea ke tiga:

“Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya”.

Serta alinea ke empat:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahtraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial maka disusunlah kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang tebentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Maka untuk mewujudkan tujuan Negara Indonesia yang tertuang pada UUDRI 1945 di atas di perlukan suatu kerja keras atau keuletan, keuletan tersebut kita kenal yaitu suatu konsep Ketahaan Nasional meliputi aspek-aspek Geografi, Demografi, Kekayaan alam (Tri Gatra) / aspek alamiah dan Idioligi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Pertahanan dan Keamanan (Panca Gatra) / aspek sosial. Oleh karena itu wawasan kebangsaan sangat penting guna mencapai tujuan-tujuan Negara Indonesia dalam melaksanakan administrasi negara.

Dalam hal ini suatu negara maupun organisasi pemerintahan serta swasta untuk mencapai tujuan yang di rumuskan sebelumnya diperluakan suatu administrasi dan manajemen yang mana fungsinya menurut Bambang Aris Nurdiana dalam diktatnya yang berjudul *Sekilas Tentang Administrasi Organisasi Manajemen* yaitu :

“Pada dasarnya administrasi berfungsi untuk menentukan tujuan organisasi dan merumuskan kebijaksanaan umum, sedangkan managemen berfungsi untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang perlu dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan dalam batas-batas kebijaksanaan umum yang telah dirumuskan”.(2010:38)

Agar dapat mewujudkan tujuan dari organisasi tersebut selain teori organisasi dan teori admnistrasi diperlukan suatu pemahaman wawasan kebangsaan agar dalam setiap proses kinerja baik itu pimpinan maupun bawahan memiliki karakter yang baik dalam melaksanakan tugas-tugas yang diembannya sehingga terjalin kerjasama yang baik pula, untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Hal serupa dinyatakan lebih luas lagi oleh Susilo Bambang Yudhoyono sebagai berikut :

“Pemahaman wawasan kebangsaan yang benar merupakan syarat keharusan untuk dapat mengelola perubahan agar mampu menghasilkan bangun bangsa dan negara seperti yang kita cita-citakan bersama. Perubahan lingkungan internal dan eksternal yang dihadapi suatu bangsa senantiasa memiliki aspek positif maupun negatif. Ada pihak yang diuntungkan dan ada pihak yang dirugikan oleh adanya perubahan itu. Tanpa adanya pemahaman wawasan kebangsaan yang benar, perubahan lingkungan tersebut akan sulit dikelola dan dimanfaatkan sebaik-baiknya bagi kemajuan bangsa dan negara. ( Yudhoyono: 2004)

Pernyataan di atas tidak hanya berlaku untuk negara saja yang aspeknya lebih luas namun berlaku juga untuk organisasi-organisasi baik organisasi pemerintahan maupun organisasi swasta, bilamana Sumber Daya Manusia di dalam suatu organisasi memiliki karakter wawasan kebangsaan yang baik maka segala bentuk penyalahgunaan wewenang tidak akan terjadi di dalam organisasi tersebut karena karakter moral maupun intelektual ada di dalam wawasan kebangsaan.

Permendagri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan merupakan jawaban atas hal-hal yang dikemukakan penyusun di atas, penyelenggaraan Pendidikan Wawasan Kebangsaan ditujukan antara lain kepada : Organisasi Politik, Organsasi Kemasyarakatan / Lembaga Nirlaba Lainnya, Pegawai Negeri Sipil, Guru / Pendidik, dan Tokoh Agama / Masyarakat / Adat. Pendidikan Wawasan Kebangsaan menggunakan pendekatan yang mengutamakan : Pembangunan karakter bangsa, pelibatan kerjasama multipihak, keterbukaan, keatifitas, integeritas antara ucapan, pikiran dan tindakan, dan penggalian dan penggunaan muatan lokal.

**Kebijakan Publik**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan, merupakan suatu kebijakan publik pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah agar melaksanakan amanat dari Permendagri tersebut. Untuk memperjelas isi amanat dari kebijakan publik tersebut penyusun menuangkan Permendageri Nomor 71 Tahun 2012.

**METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif . Dimana peneliti berusaha untuk menjelaskan gambaran yang nyata tentang evaluasi program Pemantapan Pemahaman Wawasan Kebangsaan yang diselenggarakan oleh Kantor KESBANGPOL Kabupaten Majalengka sebagai wujud Implementasi Peraturan Mendagri Nomor 71 Tahun 2012.

Menurut Maleong dalam bukunya yang berjudul *Metode Penelitian Kualitatif* mengemukakan penelitian kualitatif sebagai berikut :

“Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya prilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain. Secara holistik dan dengan cara depenelitian dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah”.(2007 : 6)

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, yang dimaksud dengan mendapatkan informasi yang seluas-luasnya dan sedalam-dalamnya adalah untuk mengungkapkan berbagai gambaran, persepsi dan permasalahan dalam masalah implementasi program Pemantapan Kemahaman Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Majalengka.

**Jenis Data dan Informasi**

**Data Primer**

Menurut Sugiyono (2012:308), data primer adalah data yang dapat diperoleh langsung dari lapangan atau tempat penelitian. Data tersebut diperoleh dari hasil wawancara langsung kepada informan. Dalam hal ini data dan informasi diperoleh dari Kepala Kantor KESBANGPOL, Kasi PPP Kesbangpol, Kepala Sekolah / Guru Pendamping Pada saat pelaksanaan PPWK di SMKN Palasah, Kepala Sekolah / Guru Pendamping Pada saat pelaksanaan PPWK di SMKN Maja, dan dua orang Pegawai Kantor KESBANGPOL yang mengetahui kondisi secara obyektif kebutuhan mereka.

**Data Sekunder**

Data sekunder adalah data-data yang didapat dari sumber bacaan dan berbagai macam sumber lainnya berupa dokumen-dokumen, laporan-laporan dan arsip lain yang ada relevansinya dengan penelitian tersebut. Data tersebut seperti struktur organisasi, peraturan-peraturan, lampiran-lampiran dari badan-badan resmi seperti kementerian kementerian, dan data-data lainnya yang diperlukan.

**Analisis Data**

Teknikanalisis data merupakan cara untuk mengolah data-data yang sudah dikumpulkan oleh peneliti supaya menghasilkan penemuan atau kesimpulan dari penelitian yang dilakukan. Teknik mengolah data ini sering disebut juga teknik menganalisis data.

Menurut Bogdan analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. (Sugiyono, 2012:334)

Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis secara *deskriftif*-*analisis*, yaitu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan arti data-data yang telah terkumpul dengan memberikan perhatian dan merekam sebanyak mungkin aspek situasi yang diteliti pada saat itu, sehingga memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya.

Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2012 : 337), analisa data kualitatif terdiri dari :

* 1. Pengumpulan Data

Data-data yang diperoleh dari aneka macam cara (observasi, wawancara, dokumentasi, pita rekaman dan lain-lain) dikumpulkan kemudian direduksi atau dipilah-pilah.

1. Data Reduction (Reduksi Data)

Diartikan sebagai proses pemilihan, perumusan, perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan informasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisa menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

1. Data Display (Penyajian Data)

Sekumpulan informasi yang telah tersusun secara terpadu dan sudah dipahami yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

1. Verifikasi Data (Kesimpulan)

Menarik kesimpulan verifikasi dari berbagai temuan data yang diperoleh selama proses penelitian berlangsung.

**PEMBAHASAN**

**Data Hasil Observasi Dan Wawancara**

Pembahasan pada penyajian data merupakan hasil analisis dan fakta yang penyusun temukan di lapangan serta disesuaikan dengan teori yang digunakan. Penunis menggunakan teori evaluasi implementasi kebijakan menurut William N. Dunn dalam bukunya Pengantar Analisis Kebijakan Publik dimana kebijakan pulik merupakan suatu proses yang mengambarkan berdasarkan kriteria – kriteria evaluasi kebijakan publik yaitu efektifitas, efisiensi, kecukupan, peralatan responsifitas, dan ketepatan. Adapun pembahasan yang depat peneliti paparkan sebagai berikut:

**1. Kriteria Efektifitas**

Dalam evaluasi implementasi kebijakan publik tentang Program Pementapan Pemahaman Wawasan Kebangsaan berupa pencapaian sasaran program pelaksanaan kebijakan dengan menyelenggarakan program sesuai amanat dari Permendagri Nomor 71 Tahun 2012 serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program PPWK ditiap metodenya. Berikut temuan di lapangan :

*Pertama,* pencapaian sasaran program dapat menjadi tolak ukur efektifitas dari program PPWK di Kabupaten Majalengka terhadap hasil (akibat) yang diharapkan dari Pemerintah pusat melalui kebijakan Permendagri. Sudah sejauh mana Kantor KESBANGPOL Kabupaten Majalengka sebagai pelaksanaan program PPWK melaksanakan mengimplementasikan program, serta hambatan yang menjadi tantangan Kantor KESBANGPOL dalam upaya pelaksanaan program PPWK secara maksimal.

Berdasarkan hasil wawancara penyusun dengan Kepala Kantor KESBANGPOL Kabupaten Majalengka beliau menggambarkan bagaimana pelaksanaan program PPWK yang telah dilaksanakan selama ini, beliau mengatakan :

“Program PPWK kami selenggarakan tiap tahun. Jumlah peserta yang kami rencanakan 400 orang peserta. Pelaksananan program PPWK pertama diselenggarakan pada tahun 2012 akhir yaitu bertempat di SKB Kabupaten Majalengka dengan sasaran program siswa/siswi SMA/Sederajat seKabupaten Majalengka dengan mengirimkan pewakilan siswa/siswi untuk mengikuti program PPWK ini, selanjutnya di tahun berikutnya tahun 2013 program dilaksanakan di SMKN Lemahsugih dengan jumlah yang sama pelaksanaan siswa.siswi SMA Sederajat sewilayah Majalengka selatan, ditahun 2013 Program diselenggarakan di SMKN Palasah dengan jumlah yang sama 400 orang peserta dan untuk tahun ini kami perencanakan program di SMKN Talaga yang akan dilaksanakan bulan Juni mendatang”

Disisi lain juga penyusun mewawancarai Kasi PPP mengenai pelaksanann program PPWK beliau mengatakan :

“Pelaksanana PPWK didasari atas Permendagri Nomor 71 Tahun 2012. Sejauh ini kami baru bisa melaksanakannya satu tahun sekali dengan waktu tiga hari kerena disesuaikan dengan perencananaan anggaran yang telah ditetapkan yang hanya mencakupi 400 orang peserta dan 25 orang panitia serta instruktur”.

Dapat dilihat dari kedua pernyataan di atas bahwa pelaksanaan program PPWK di Kabupaten Majalengka belum maksimal hasil yang diinginkan belum tercapai bila mengacu pada Permendagri Nomor 71 Tahun 2012 karana dalam Permendagri tersebut tidak tertulis untuk sasaran pelajar melainkan untuk organisasi politik, organisasi kemasyarakatan/lembaga nirlaba lainnya, pegawai negeri sipil guru/pendidik, dan tokoh agama/masyarakat/adat.

Namun disisi lain Penyusun sangat apresiasi sekali dengan usaha yang dilakukan Kantor KESBANGPOL Kabupaten Majalengka untuk dapat menyelenggarakan program PPWK di Kabupaten Majalengka dilihat dari tahun pertama kali PPWK dilaksanakan yang mana PPWK dilaksanakan di akhir tahun 2012, padahal Permendagri baru saja dikeluarkan pada tanggal 28 Oktober 2012. Serta yang penyusun lihat disini Pemerintah Kabupaten Majalengka melalui Kantor Kesbangpol Kabupaten Majalengka menyikapi kebijakan Pemerintah Pusat pengambilan keputusan didasari atas kebijaksanaan disesuaikan dengan kemampuan Pemerintah Daerah dalam segi anggaran dan kemampuan SDM di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majalengka itu sendiri, selain jumlah pegawai hanya 23 orang, tugas yang di emban cukup banyak.

*Kedua,* Hambatan yang di hadapi Kantor KESBANGPOL Majalengka dalam pelaksanaan program PPWK. Berikut pernyataan dari Kasi Tahbang :

Tidak siapnya tempat dimana sasaran program akan dilaksnakan dikarnakan sarana prasarana tidak mendukung untuk pelaksananan kegiatan hal ini terjadi pada SMKN Talaga yang dimana telah direncanakan untuk tahun ini namun batal dilaksanakan dikarnakan fasilitas yang dimiliki sekolah tersebut tidak mendukung untuk memenuhi program pada akhirnya kami memindahkan pelaksanaan program ketempat yang lebih siap dari segi fasilitas yaitu di SMKN Maja”

Hal serupa disampaikan Kasi PPP

“Dalam setiap pelaksanaan sebelumnya kami membuat suatu perencanaan dan disusun dalam rencana kerja dan kami tidak dapat menunda atau membatalkan kegiatan tersebut, sebagai arternatif kami memindahkan tempat pelaksanaan ke tempat yang siap”.

Dari pernyataan di atas penyusun menyimpulkan hambatan pelaksanaan program PPWK yaitu pada sarana prasarana yang dimiliki karna dalam pelaksanaan PPWK itu sendiri diperlukan fasilitas yang mendukung sesuai yang tertuang dalam Peremendagri Nomer 71 Tahun 2012 bentuk Kegiatan PWK antara lain pelatihan/*training of facilitator*, *outbound*, lomba cerdas cermat, permainan, diskusi/dialog, dan seminar dan lokakarya.

Selain itu yang penyusun melihat hambatan dalam segi jumlah SDM dari Kasi PPP sebagai Penyelengara yang hanya berjumlah lima orang pegawai yang dimana kesulitan untuk dapat merencanakan, mengimplementasikan, sampai pelaporan dan pengevaluasian di rasa menyulitkan, namun hal tersebut di jawab oleh salah satu pegawai di bagian Kasi PPP

“Dalam hal ini walaupun jumlah pegawai sedikit tapi staf bagian lain ikut serta dalam pelaksanaan dari awal hingga akhir, begitupun staf kami bila mana ada staf yang lain sedang melaksanakan kegiatan kami turut membantu”.

Hal serupa diperkuat oleh Kasi PPP yang dimana beliau sampaikan

“Dalam pelaksanaan program PPWK ini kami melibatkan unsur external dari kesbangpol yang sebelumnya kami rencanakan dalam bentuk SK dan MOU dengan Kodim Majalengka, Departemen Agama Majalengka, Dinas Pendidikan Majalengka. Kami juga libatkan Kodim Majalengka sebagai panitia serta instruktur kegiatan”.

Dari pernyataan diatas penyusun menyimpulkan untuk meningkatkan Koordinasi dan kerjasama dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan melalui pelaksanaan program Kegiatan Pemantapan Pemahaman Wawasan Kebangsaan, kerjasama untuk mencapai tujaan dalam organisasi ialah suat kewajiban agar efektif dan efisien selaian itu MOU dengan pihak eksternal agar program optimal diselenggarakan tepat sasaran berdaya guna serta berhasil guna.

**2. Kiteria Efesiensi**

Efisiensi merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk mengasilkan target pencapaian tujuan dengan memperhatikan hal – hal yang diperlukan sehingga suatu kebijakan dapat dilaksanakan dengan baik. Berkaitan dengan usaha yang dilakukan Kantor KESBANGPOL Majalengka sebagai berikut :

***Pertama*,** usaha yang dilakukan KESBANGPOL untuk melaksanakan program PPWK berkaitan dengan usaha – usaha yang dilakukan, hal ini dapat dituangkan dari pernyataan Kepala Kantor KESBANGPOL, sebagai berikut :

“Melakukan pendekatan kerjasama terhadap seluruh *stakeholder* yang terkait dengan melaksanakan program PPWK, mulai dari pihak TNI – Polri, Dinas Pendidikan, Departemen Agama, sampai Tim Penggerak PKK Kabupaten Majalengka”

Hal serupa juga dikemukakan oleh Kasi PPP yang dimana telah penyusun tuangkan di atas. Selanjutnya Kasi PPP mengatakan :

“Kerjasama tersebut selain untuk membantu kami dalam melaksanakan kegiatan kami juga mengajukan pemateri dari pihak external diantaranya materi kewaspadaan nasional, kesadaran berbangsa bernegara, sejarah nilai – nilai kebangsaan pemateri dari Kodim, materi bahaya narkoba dari Polres, Pembinaan Rohani dari Departemen Agama, empat pilar dari Dinas Pendidikan, serta dari Ketua TP PKK materi tentang Keluarga. Disisi lain kegiatan dilapangan seperti PBB dan *Outbaone* instruktur dari Kodim”.

Selain itu penyusun juga melihat dari beberapa media yang meliputi program tersebut baik media cetak maupun media online dengan mengundang para stakeholder Muspida Plus, Kepala SKPD serta Para Tokoh menghadiri Pembukaan kegiatan tersebut yang mana menurut penyusun ini suatu bagian sosialisasi yang dilakukan agar dilain waktu kegiatan tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Permendagri Nomor 71 Tahun 2012.

***Kedua*,** sistem atau prosedur yang dilakukan Kantor KESBANGPOL Kabupaten Majalengka dalam pelaksanaan program PPWK, berikut pernyataan dari Kasi PPP :

“Program PPWK ini diselenggarakan selama tiga hari peserta menginap peserta tidak hanya mendapatkan materi saja, peserta di latih kedisiplinan dalam kehidupan sehari – hari dari awal mereka bangun tidur pagi sampai mereka tidur kembali di malam hari”.

Selanjutnya Pembina Osis SMKN 1 Palasah di kala kegiatan berlangsung sebagai pendamping dari pihak sekolah mengemukakan:

“Permintaan dari sana (KESBANGPOL) untuk para peserta mereka meminta anak – anak sejumlah 400 orang yang tingkat kenakalannya tinggi”.

Terlihat sistem yang dilakukan oleh Kantor KESBANGPOL untuk mendukung pelaksanaan program di susun berbagai kegiatan untuk waktu tertentu serta memprioritaskan kepada peserta yang memiliki tingkat kenakalan tinggi untuk diikut sertakan dalam kegiatan tersebut dengan harapan ada perubahan prilaku setelah mengikuti program PPWK.

Hal lain tentang Pendidikan Wawasan Kebangsaan yang dilaksanaka oleh Kantor KESBANGPOL Kabupaten Majalengka, Kepala Kantor mengutarakan :

“Jauh hari sebelum pelaksanaan PPWK ini kami telah melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan wawasan kebangsaan, berupa sosialisasi dalam bentuk seminar kepada para Tokoh – tokoh masyarakat, Partai politik, LSM / ORMAS yang ada di lingkup Kabupaten Majalengka dengan berbagai materi sesuai program kegiatan yang dilaksanakan diantaranya materi pendidikan politik sampai materi bahaya Radikalisme, Terorisme, Komunisme, ISIS, dll. Dengan narasumber yang kopenten”.

Terlihat bahwa sistem yang dilakukan Kantor KESBANGPOL dalam melaksanakan kegiatan yang bertajuk wawasan kebangsaan tidak hanya PPWK saja melainkan melalui sosialisasi sebagai bagian dari aparatur pelayan publik.

**3. Kiteria Kecukupan**

Kecukupan masih berhubungan dengan efektivitas dengan mengukur atau memprediksi seberapa jauh alternatif yang ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi.

Program PPWK yang diselenggarakan Kantor KESBANGPOL Kabupaten Majalengka sejatinya ialah suatu kebijaksanaan dalam mengambil keputusan untuk menindak lanjuti Permendagri Nomor 71 Tahun 2012 dalam suatu program kegiatan untuk membangun SDM masyarakat yang berwawasan kebangsan dikarnakan paradigma – paradigma yang berkembang menyangkut wawasan kebangsaan yang dirasa menurun dan suatu kewaspadaan dalam menghadapi disintegrasi bangsa dari pihak – pihak yang ingin menghancurkan tatanan hidup bangsa Indonesia yang sebagaimana dalam empat konsensus berbangsa bernegara Indonesia serta untuk mempertebal jiwa nasionalisme yang mana bangsa ini sedang menghadapi Era Globalisasi dan akan menghadapi MAE ( Masyarakat Ekonomi Asean ) yang kita kenal juga dengan AFTA atau pasar bebas di kawasan ASEAN. Berikut pernyataan Kepala Kantor KESBANGPOL mengenai program PPWK di Kabupaten Majalengka menghadapi isu – isu tersebut diatas :

“Proritas kami dalam melaksanakan program ini ialah pelajar SMA / Sederajat untuk kelas 2 dan 3 dikarnakan mereka sedang menjalani masa mencari jati diri dan mereka akan beranjak ke tingkat yang lebih tinggi baik bekerja ataupun kuliah, nah di masa itulah mereka biasanya menjadi sasaran para kelompok - kelompok yang ingin menghancurkan integrasi bangsa melalui pengkaderan bahkan mencuci otak agar bias bergabung dengan mereka”.

Dapat dilihat dari pernyataan tersebut perioritas utama untuk memenuhi kecukupan ialah pelajar SMA / Sederajat kelas 2 dan 3 sebagai upaya miminalisir bertambahnya jumlah kelompok – kelompok yang tidak inginkan bangsa ini bersatu atau merubah ideologi Pancasila. Dengan pendekatan melalui program PPWK ini hal-hal tersebut diantisipasi sedini mungkin..

Selanjutnya Kepala Kantor menyampaikan :

“Pada awalnya progam PPWK ini diselenggarakan tahun 2012 akhir di SKB Kabupaten Majalengka perwakilan peserta dari SMA / Sederajat Sekabupaten Majalengaka, setelah itu kami mengevaluasi dan pada tahun berikutnya 2013 mengacu pada hasil evaluasi kebijakan di rubah dengan melaksanakan program di SMKN Lemahsugih pelajar SMA / Sederajat sewilayah Majalengka Selatan, dengan proritas kami dikarnakan wilayah selatan catatan masa lalu merupakan wilayah rawan disintgrasi bangsa. Lalu kami mengevaluasi kembali selain kenakalan remaja di wilayah utara cukup tinggi dan pada saat itu sedang ramai – ramainya gank motor di wilayah majalengka serta mendekati MAE dan AFTA ini kami memprioritaskan sasaran program di tahun 2013 di SMKN Palasah dengan maksud mengurangi tingkat kenakalan di wilayah majalengka utara dan mempersiapkan semberdaya pelajar SMK untuk menghadapi AFTA karna mereka berbesik inovasi yang akan bersaing dengan Negara lainya”.

Pada pernyataan tersebut diatas penyusun menyimpulkan untuk memenuhi kecukupan KESBANGPOL memprioritaskan mana yang lebih harus di dahulukan dalam pelaksanaan program PPWK, dari sini penyusun menjabarkan jumlah penduduk Kabupaten Majalengka tahun 2013 saja berjumlah 1.180.774 jiwa untuk memenuhi pelayanan tersebut tidak mungkin dapat terealisasi, namun dengan 400 orang perajar tiap tahunnya dengan harapan dapat mempengaruhi lingkungan sekolah, keluarga serta tempat tinggal mereka yang lebih utama untuk diri mereka sendiri terlebih dahulu dan untuk cakupan jumlah pelajar disekolah kalau diambil rata – rata jumlah siswa – siswi di suatu sekolah berjumlah 1000 orang, 400 orang yang mengikuti program PPWK diharapkan dapat mempengruhi 600 orang yang tidak ikut program tersebut. Selain itu untuk menghadapi AFTA pelajar SMK dalam mengembangkan ilmu berinovasi jangan sampai inovasi yang mereka temukan malah di jual ke pihak asing dikarnakan kurangnya rasa kebangsaan.

**5. Peralatan**

Kebijakan yang berorientasi pada perataan adalah kebijakan yang akibatnya atau usaha secara adil di distribusikan. Suatu program tertentu mungkin dapat efektif, efisien, dan mencukupi apabila biaya-manfaat merata. Kunci dari perataan yaitu keadilan atau kewajaran.

***Pertama****,* tantangan dari program PPWK di Kabupaten majalengka adalah membangun karakter moral maupun karakter intelektual masyarakat dengan cara mengsosialisasikan program PPWK namun belum optimalnya program serta sosialisasi di masyarakat luas hal tersebut berkaitan dengan angaran serta SDM di Kantor KESBANGPOL itu sendiri proritas utama sasaran program terhadap pelajar – pelajar sebagai generasi penerus yang akan datang, serta fasilitas sekolah yang dimiliki sebagai peralatan terlaksananya program. Kepala Kantor KESBANGPOL menyampaikan mengenai peralatan, sebagai berikut :

“Sosialisasi program PPWK selain mendahulukan prioritas fasilitas di sekolah menunjang untuk semua kegiatan dimana tidak hanya sampai disitu saja kami harapkan setelah kegiatan berahir pihak sekolah menindaklanjuti program dalam kegiatan belajar mengajar tiap harinya disekolah”.

Pernyataan diatas menegaskan dengan fasilitas yang dimiliki sekolah program dapat berjalan dengan lancar dan dapat dengan mudah di evaluasi bagaimana perkembangan sebelum dan setelah mengikuti kegiatan tersebut, karena setelah selesai mengikuti kegiatan tersebut sasaran program akan kembali lagi kesekolah seperti biasa mengikuti kegiatan belajar mengajar selain itu dapat dinilai sejauh mana perkembangan sasaran program sebelum dan sesudah mengikuti kegiatan tersebut wilayah sasaran program tinggal baik wilayah utara maupun selatan atau dataran rendah maupun dataran tinggi yang biasanya memiliki karakter yang berbeda.

***Kedua****,* sosialisasi menjadi bagian utama setelah terbentuknya suatu kebijakan, dalam hal ini adalah program PPWK yang sudah ada apakah sudah diketahui oleh seluruh masyarakat Majalengka. Penyaluran informasi terantu oleh media cetak maupun elektronik, seperti yang penyusun amati kegiatan program PPWK tersosialisasikan melalui media baik media swasta maupun mirik pemerintah tersajiakan dalam cetak maupun elektronik. Hal lain diutarakan Kepala Kantor KESBANGPOL, berikut peryataannya :

“Kami berkoordinasi dengan Camat, Kepala Desa, Tokoh – tokoh masyarakat serta Ibu – ibu PKK untuk berperan dalam memberikan wawasan kebangsaan kepada masyarakat di wilayahnya masing – masing entah itu dalam pertemuan – pertemuan dalam suatu kegiatan di desa – desa”.

Pernyataan di atas menegaskan bahwa sosialisasi wawasan kebangsaan telah dilakukan merata atau menyeluruh dengan cara berkoordinasi dengan Pemerintah Kecamatan sampai Desa untuk selalu mengingatkan betapa penting wawasan kenagsaan dalam tatanan kehidupan berbangsa bernegara.

**5. Responsivitas**

Suatu keberhasilan kebijakan dapat dilihat melalui tanggapan masyarakat yang menanggapi pelaksanaan setelah terlebih dahulu memprediksi pengaruh yang akan terjadi jika suatu kebijakan akan dilaksanakan, juga tanggapan masyarakat setelah dampak kebijakan sudah mulai dapat dirasakan dalam bentuk yang positif berupa dukungan ataupun wujud yang negatif berupa penolakan.

Oleh karena itu, kriteria responsivitas cerminan nyata kebutuhan, preferensi, dan nilai dari kelompok-kelompok tertentu terhadap kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan, dan kesamaan.

Dalam hal ini penyusun untuk mencari data responsifitas, penyusun melaksanakan observasi ke tempat dimana yang pernah menjadi sasaran program PPWK yaitu SMKN Palasah dan SMKN Maja. Pada dasarnya dari kedua sekolah tersebut sangat mengapresiasi dengan pelaksanaan program PPWK. Berikut pernyataan Pembina Osis SMKN Palasah selaku pendamping pada saat kegiatan berlangsung :

“Kami dari pihak sekolah sangat mendukung dengan kegiatan tersebut, menginginkan agar tiap tahunnya di laksanakan di sini tapi kami memaklumi dengan minimnya anggaran yang dimiliki”.

Hal berikut dikemukakan oleh Kasi PPP :

“Pembangunan SDM lain halnya seperti pembangunan fisik contoh jalan yang keliatan rusak lalu diangarkan untuk diperbaiki dalam hal ini kamipun memaklumi”.

Dari pernyataan – pernyataan di atas anggaran menjadi masalah tidak optimalnya program PPWK dalam hal ini hanya dapat dilaksanakan satu tahun satu kali oleh sebab itu KESBANGPOL harus dapat efisiensi agar mencapai efektivitas pelaksanaan program dengan menyusun strategi cakupan perioritas mana yang didahulukan untuk menerima program PPWK.

Selanjutnya evaluasi dampak hasil pelaksanaan program PPWK setelah mengikuti kegiatan tersebut, penyusun mewawancarai Pembina Osis SMKN Palasah, adalah sebagai berikut :

“Jangka waktu dua bulan ada perubahan dari anak – anak nilai – nilai kedisiplinan meningkat namun kesananya perubahan itu mulai menurun, apalagi sekarang sudah satu tahun dan setengahnya sudah lulus sekolah, seharusnya program ini berjalan secara *continue* namun kami pun berupaya menindaklanjutinya dengan dalam kegiatan belajar mengajar selalu menerapan konsep wawasan kebangsaan”.

“Dikita masih hangat yah karna pelaksanaan ini bulan mei akhir kemarin masih hangat walaupun terseling waktu libur panjang saya melihat adanya kerinduan dari anak – anak sikap yang patriotisme saya melihat seperti tadi pada waktu pelaksanaan upacara bendera melihat anak – anak semangat dan pada waktu megheningkan cipta terlihat betul – betul menghayati berdoa biasanya mereka saya perhatikan itu nunduk mah nunduk tapi gatau ngalamun mungkin. Emang seharunya *continue* diterapkan jangan putus disini saja dan kami pun menindaklanjuti membuat kegiatan yang sama diselengarakan oleh kami berkoodinasi bersama pihak Muspika Kecamatan, Alhamdullilah berjalan sesuai yang diharapkan malah mendapatkan dukungan dari orang tua siswa berpatrisipasi dengan kegiatan ini dan malah saya sempat berbincang dengan orang tua siswa pada kala itu mengantar anaknya sangat mendukung kegiatan ini”.

Dari kedua pernyataan diatas untuk merubah karakter seseorang menjadi lebih baik emang sulit banyak faktor yang karakter seseorang itu terbentuk dari lingkungan keluarga, tempat tinggal, sekolah, dll. Berangkat dari sini penyusun menyimpulkan pendidikan karakter baik itu karakter moral maupun intelektual bukan hanya tanggung jawab orang tua namun tanggung jawab semua pihak baik lingkungan sampai Pemerintah. Semua orang tua inginkan mempunyai anak dengan karakter yang baik namun sejauh mana orang tua dapat mengkonrol anak mereka diluaran sana dan kerterbatasan SDM orang tua yang berbeda – beda dari segi pekerjaan, pendidikan, latar belakang keluarga, dll. Dan untuk mengefisiensikan hal tersebut ini tanggungjawab pemerintah melalui pendidikan di sekolah maupun perguruan tinggi untuk membentuk karakter. Jadi apa yang mereka tidak dapatkan di rumah mereka dapatkan di lingkungan mereka menimba ilmu untk diaplikasikan di lingkungan mereka tinggal.

Selanjutnya dalam wawancara dengan dua orang guru di lokasi yang berbeda tentang respon peserta, penyusun mendapatkan pernyataan yang sama. Sebagai berikut:

“Pada awalnya anak – anak merasa takut di ikusertakan kegiatan tersebut, mungkin mereka menyadari mereka nakal dibandingkan teman – teman yang tidak terdaftar sebaga peserta, apalagi TNI sebagai instrukur namun itu semua berubah menjadi cair karna metode pembelajaran yang afaktif serta tidak menegangkan baik di dalam maupun luar ruangan dan mereka senang sekali dengan kegiatan *outbone* dari pahak TNI sebagai instruktur”.

Dari pernyataan di atas penyusun menyimpulkan kunci dari kegiatan yaitu bagaimana cara pendekaan pengajar / pemateri serta instruktur dilapangan sesuai dengan Permendagri Nomer 71 Tahun 2012 pasal 6 ayat 1 dan 2 yaitu :

“PWK menggunakan pendekatan yang mengutamakan: pembangunan karakter bangsa, pelibatan kerjasama multipihak, keterbukaan, kreatifitas, integritas antara ucapan, pikiran dan tindakan dan penggalian dan penggunaan muatan lokal. Pendekatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menghindari bentuk indoktrinasi”.

Selanjutnya mengenai kendala pihak sekolah dalam pelaksanaan kegiatan tersebut kedua Guru ini mempunyai jawaban yang sama

“Untuk kendala tidak ada, kami memiliki sarana prasarana yang lengkap semua yang dibutuhkan dalam kegiatan tesebut tersedia apalagi di SMK Maja kami memilki lahan seluas 7 hektar dan untuk di Palasah kendala yaitu air karna musim kemarau tapi masih bisa diatasi sampai sampai kegiatan selesai”.

Dari pernyataan soal kendala yang digabungkan oleh penyusun dapat disimpulkan sarana prasarana merupakan faktor utama kegiatan berlangsung dengan lancar agar semua kegiatan dapat di laksanakan semua sesuai dengan perencanaan sebelumnya.

Selanjutnya untuk tempat tinggal para peserta sejauh mana cakupan mepengaruhi lingkungan untuk berarakter wawasan kebangsaan. Pernyataan Pembina Osis SMKN Palasah sebagi berikut :

“Dominan para pelajar disini bertempat tinggal di Palasah namun banyak juga yang dari Ligung, Jatiwangi, Sumber jaya. Minimal untuk diri mereka sendiri terlebih dahulu”.

Hal lain diungkapkan Wakasek Kesiswaan SMKN Maja

‘Untuk di SMKN Maja pelajar didominasi dari orang luar maja malah orang luar Kabupaten Majalengka pun banyak di sini orang jawa yang mondok pesantren, selain untuk diri mereka sendiri dapat mempengaruhi yang lain”.

Dari kedua pernyataan diatas strategi yang digunakan KESBANGPOL untuk kecakupan sangat baik dapat digambarkan dari 400 peserta kelas 2 dan 3 dengan harapan selain untuk diri mereka sendiri, mereka dapat mempengaruhi teman, adik kelas dan dikala kelas 3 telah lulus masih ada kelas 2 yang naik ke kelas 3 untuk bisa mempengaruhi siswa baru kelas 1. Dan sangat diharapkan mereka dapat mempengaruhi dimana tempat mereka tinggal masing – masing.

Selanjutnya kedua narasumber mengungkapkan

“Program ini harus terus berjalan, seperti halnya Penataran P4 dimana masa orde baru dan saya rasa tidak ada salahnya kalau kita melanjutkan program - program yang emang itu baik dimasa orde baru diterapakan di orde sekarang ini, bahkan program – program di masa orde lama pun yang baik dan itu pun harus diterapkan di masa sekarang ini”.

Dari pernyataan kedua narasumber yang penyusun gabungkan penyusun menyimpulkan menilai sistem perpolitikan di Indonesia selama ini emang di dasarkan ego pemimpin selanjutnya dimana bila ada program yang di rasa bermanfaat di era kepemimpnan sebelumnya tidak dilanjutkan. Kalau emang ada pemikiran bentuk produk orde baru dari kegiatan wawasan kebangsaan ini itu salah besar. Negara dimanapun yang beridiologikan apapun wawasan kebagsaan harus diterapkan kepada warganya. Untuk program PPWK ini jelas tertuang dalam Permendagri Nomer 71 Tahun 2012 pasal 6 ayat 2 “Pendekatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menghindari bentuk indoktrinasi”.

**6. Ketepatan**

Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut artinya ketepatan dapat di isi oleh indikator keberhasilan kebijakan lainnya (bila ada). Misalnya dampak lain yang tidak mampu di prediksi sebelumnya baik dampak tak terduga secara positif maupun negatif atau dimungkinkan alternatif lain yang dirasakan lebih baik dari suatu pelaksanaan kebijakan sehingga kebijakan bisa lebih dapat bergerak secara lebih dinamis.

***Pertama****,* tujuan dari hasil yang akan dirasakan dari program PPWK adalah mampu memberikan kontribusi kepada masyarakat luas dalam hal ini melalui para pelajar yang menjadi sasaran program dengan harapan dapat memahami, menghayati dan mengamalkan nilai – nilai wawasan kebangsaan. Dengan demikian bila sudah dipahami, mudah menjadi pedoman dalam kehidupan sehari – hari. Berikut pernyataan Kepala Kantor KESBANGPOL :

“Ya seperti yang tadi sebelumnya disampaikan proritas kami untuk saat ini ialah para pelajar SMKN selain untuk menanamkan jiwa nasionalisme mempersiapkan mereka untuk menghadapi AFTA, MAE, Globalisasi serta untuk majalengka sendiri yang akan menjadi kota metropolitan dan kedepannya sasaran program kami akan mengupayakan tidak hanya pelajar saja tapi Ibu – Ibu PKK juga karna dari mereka pendidikan karakter anak di ajarkan dari masih dalam kandungan”.

Hal lain ditambahkan oleh Kasi PPP :

“Betul, yang menjadi prioritas kami yaitu pelajar SMK dan rata – rata dari mereka setelah lulus memasuki dunia kerja untuk membekali diri mereka melalui pendidikan wawasan kebangsan”.

Dari kedua pernyataan diatas penyusun menyimpulkan strategi dalam pengambilan keputusan dari suatu kebijakan adalah suatu kebijaksanaan yang dimana Pemerintah Kabupaten Majalengka melalui Kantor KESBANGPOL memutuskan sasaran program untuk sekarang ini dan di rencanakan pada Rencana Strategis KESBANGPOL tahun 2012-2013 untuk pelajar.

***Kedua,***payung hukum dari program PPWK adalah Permendagri Nomor 71 Tahun 2012 dan Undang – Undang Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2013. Sebagai pedoman pelaksanaan program ialah Permendagri Nomor 71 Tahun 2012. Berikut pernyataan Kepala Kantor tersebut :

“Pelaksanaan program wawasan kebangsaan berpedoman pada Permendagri dan Undang – Undang tersebut. Jadi ini program pemerintah pusat yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah” (wawancara, 9 Maret 2013)

Hal serupa disampaikan oleh Kasi PPP.

Dari peryataan itu penyusun menyimpulkan dalam hal ini pelaksanaan program PPWK tidak sesuai dengan isi dari Permendagri Nomer 71 Tahun 2012 yang mana sasaran program di lingkungan pendidikan (sekolah) tidak untuk para pelajar melainkan untuk pendidik / guru. Namun untuk mengambil sebuah keputusan menyikapi kebijakan pemerintah pusat KESBANGPOL Kabupaten Majalengka memutuskan sasaran program PPWK ialah para pelajar yang mana dengan alasan telah di depenelitiankan penyusun di atas, untuk mengurangi ketidakpastian dan pengeluran sumber – sumber dalam rangka mengejar tujuan dari program.

Langkah selanjutnya dalam proses analisis data adalah melakukan kegiatan interpretasi hasil penelitian, interpretasi hasil penelitian merupakan penafsiran terhadap hasil akhir dalam melakukan pengujian data dengan teori dan konsep para ahli sehingga biasa mengembangkan teori atau bahkan menemukan teori baru serta mendepenelitiankan dari hasil data dan fakta dilapangan. Penyusun dalam hal ini menghubungkan temuan hasil penelitian dilapangan dengan dasar oprasional penelitian yang telah ditetepkan sejak awal, dalam hal ini adalah teori implementasi kebijakan yang diperkenalkan oleh William N Dunn.

Ada enam kiteria yang dapat mengevaluasi suatu kebijakan dapat dikatakan berhasil atau tidak dalam proses implementasi atau pelaksanaan yaitu, kriteria efektifitas, efisiensi, kecukupan, peralatan, responsifitas, dan ketepatan. Adapun temuan yang didapatkan dalam penelitian menenai Evaluasi Implementasi Kebijakan Publik Tentang Program Pemantapan Pemahaman Wawasan Kebangsaan di Kabupaten. adalah sebagai berikut :

**1. Efektifitas**

Efektifitas yang berkaitan dengan pencapaian sasaran program dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program PPWK itu sendiri. Temuan dilapangan terlihat bahwa pencapaian sasaran program belum maksimal di karenakan fasilitas yang tidak memadai untuk terlaksananya kegiatan program, sumber dana yang berasal dari APBD masih rendah, Sumber Daya Manusia di Kantor KESBANGPOL Kabupaten Majalengka total keseluruhan 23 pegawai.

Fasilitas tempat dilaksanakan program merupakan sarena pertama agar program berjalan sesuai dengan sasaran program yang telah ditentukan bedasarkan indikator yang menjadi prioritas tidak di laksanakan di tempat / cakupan wilayah tersebut di karenakan bila sarana tidak mendukung kegiatanpun tidak dapat dilaksanakan.

Kemudian pada sumber dana. Walaupun berdasaarkan Permendagri program tersebut merupakan kebijakan dari pemerintah pusat namun pendanaan kegiatan berasal dari APBD Kabupaten. Pelaksanaan kegiatan program tersebut hanya dapat dilaksanakan satu tahun sekali di tempat/wilayah yang berbeda setiap tahunnya dengan jumlah pesera 400 orang.

Kemudian Jumlah staf (Sumber Daya Manusia Pegawai Kantor KESBANGPOL ) yang berjumlah total 23 pegawai tentu tidak dapat melayani seluruh jumlah penduduk Kabupaten Majalengka yang berjumlah lebih dari satu juta jiwa.

**2. Efisiensi**

Efisiensi yang berkaitan dengan usaha – usaha yang dilakukan Kantor KESBANGPOL Kabupaten Majalengka dan sistem serta prosedur dalam program PPWK. Temuan dilapangan Kantor KESBANGPOL Kabupaten Majalengka telah membangun kerjasama dengan *stakeholders* seperti Kasi – Kasi dan Kasubag TU dari pihak internal dan pihak external seperti KODIM Majalengka dan Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka serta pendukung kegiatan dari POLRES Majelengka, KEMENAG Kabupaten Majalengka, dan PKK Kabupaten Majalengka, baik sebagai instruktur dan pemateri sesuai dengan materi yang disampaikan.

Sistem dan prosedur kegiatan program PPWK dilaksanakan tiga hari tiga malam menginap di tempat pelaksanaan tersebut dengan sistem seperti asrama peserta tidak hanya mendapatkan materi – materi di dalam ruangan saja namun peserta mendapatkan materi di luar ruangan seperti halnya yang tercantum dalam Permendagri Nomor 71 Tahun 2012. Peserta dididik hidup disiplin dari peserta bangun sampai tidur kembali dengan harapan apa yang telah diberikan melelui program ini dapat di aplikasikan dalam kehidupan sehari – hari peserta dan mempengaruh di lingkungan peserta tinggal.

Kemudian untuk mengefisienkan sasaran program yaitu calon peserta program PPWK ini pihak KESBANGPOL sebagai penyelenggara meminta anak yang mempunyai tingkat kenakalan yang tinggi dibandingkan yang lain serta memilih siswa/siswi kelas dua dan tiga agar selain diharapkan bisa mempengaruhi adik teman dan adik kelas serta lingkungan dimana peserta tinggal, peserta setelah lulus sekolah dan akan menduduki tempat yang baru baik itu melanjutkan ke Perguruan Tinggi ataupun bekerja perserta sudah mempunyai dasar apa itu nilai – nilai kebangsaan dengan harapan peserta tidak terpengaruh dengan ajakan/cuci otak pihak – pihak yang bersebrangan dengan nilai-nilai bangsa yang tercantum dalam empat konsensus berbangsa bernegara Indonesia , selain itu serta menjadi pribadi yang baik menjadi contoh tauladan dan diharapkan peserta dapat mempengaruhi dilingkungan tempat baru peserta.

Selain pelaksanaan program PPWK Kantor KESBANGPOL Kabupaten Majalengka melaksanakan sosialisasi tentang penting wawasan kebangsaan ini melalui seminar – seminar pendidikan politik sesuai tugas pokok dan fungsi Kantor KESBANGPOL Kabupaten Majalengka. Namun untuk pelaksanaan program PPWK yang sesuai amanat Permendagri Nomer 71 Tahun 2012 baru bisa melaksanakan program kepada siswa/siswi SMA / Sederajat sebagai prioritas utama dikarnakan mereka adalah calon penerus bangsa yang posisinya masih labil untuk mencari jati diri.

**3. Kecukupan**

Kecakupan pada pelaksanaan program PPWK ini sebagai mana amanat Permendagri Nomor 71 Tahun 2012 untuk melaksanakan pendidikan wawasan kebangsaan di tiap Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, sejauh ini pengambilan keputusan sasaran program dari kebijakan pemerintah pusat tersebut menjalankan suatu kebijaksanaan di mana sasaran program yaitu siswa/siswi SMA/Sederajat di karenakan seperti pada kiteria efisiensi telah dijelaskan di atas serta untuk memenuhi cakupan wilayah dengan harapan biasa mempengaruhi wilayah di lingkungan peserta tinggal serta memprioritaskan wilayah – wilayah mana yang dikatagorikan lebih rawan disintegrasi bangsa dan menghambat penyebarluasannya dibandingkan wilayah lain yang ada di Kabupaten Majalengka.

Program PPWK ini pun dari segi kecukupan dalam pembangunan manusia / makro dalam hal ini menghadapi Globalisasi, MEA dan juga AFTA sebagai wawasan intelektual bagi masyarakat untuk mempersatukan persatuan bangsa dengan mengevaluasi segala bentuk kegiatan yang telah dilaksanakan yang mana pada di tahun 2012 pelaksanaan dilaksanakan dengan konsep gabungan siswa/siswi SMA/Sederajat di seluruh wilayah Kabupaten Majalengka namun pelaksanaan tersebut di rasa kurang tepat untuk menghasilkan cakupan wilayah karna berat para peserta yang menjadi utusan – utusan sekolah untuk mempengaruhi lingkungan sekolah maupun wilayah tempat tinggal peserta dan pada akhirnya hasil evaluasi dari kegiatan tersebut pelaksanaan di tahun berikut 2013 dilaksanakan di Majalengka Wilayah selatan dengan mengirimkan utusan – utusan dari tiap – tiap SMA/Sederajat sewilayah Majalengka selatan dikarnakan potensi disintegrasi bangsa diwilayah tersebut tingkat kerawanannya cukup tinggi melihat dari segi *history* wilayah tersebut. Lalu di tahun 2013 program dilaksanakan di wilayah utara dan hanya satu tempat yang dijadikan objek yaitu SMKN Palasah dan peserta semua dari SMKN Palasah tapi dengan tujuan yang sama untuk mencapai cakupan wilayah utara karna domisili siswa/siswi SMKN Palasah tersebar di wilayah utara Majalengka, selain itu untuk menghadapi Globalisasi, MEA dan AFTA dimana diharapkan menjadi daya rangsang untuk membuat inovasi – inovasi yang mampu berdaya saing dengan bangsa lain dan yang lebih terpenting di kala mereka dapat membuat suatu inovasi mereka sumbangkan karya mereka untuk Bangsa Indonesia tidak mereka jual untuk kepentingan asing selain itu tingkat kenakalan remaja di wilayah utara cukup tinggi dan pada tahun 2013 yang lalu gank motor meresahkan wilayah Majalengka khususnya wilayah utara. Pelaksanaan program tahun 2013 untuk memenuhi cakupan dilaksanakan di wilayah dataran tinggi yaitu SMKN Maja dengan tujan sasaran program sama halnya seperti tahun sebelumnya dan untuk kedepan tidak hanya para siswa/siswi yang menjadi sasaran program PPWK namun Ibu-ibu PKK juga akan menjadi prioritas program dengan harapan baik untuk diri Ibu itu sendiri dan disosiaisasikan kembali kepada Ibu-ibu lain agar dapat mendidik anak-anak mereka berkarakter moral maupun intelektual karana karakter seorang manusia dibentuk dari anak itu masih di dalam kandungan dan di didik semenjak anak itu lahir.

**5. Peralatan**

Sebagaimana tangtangan dari program PPWK ini untuk membangun karakter moral mapun intelektual masyarakat di Kabupaten Majelengka dan mengacu pada prioritas sasaran program yang mana didahulukan serta disesuaikan dengan jumlah SDM penyelenggara yakni para pegawai Kantor KESBANGPOL itu sendiri, anggaran untuk pelaksanaan program dan fasilitas – fasilitas pendukung terlaksananya program PPWK ini dengan sasaran program para pelejar SMA/ Sederajat di Kabupaten Majalengka dalam hal ini pihak KESBANGPOL melakukan kesepakatan bersama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka yang membawahi sekolah – sekolah yang berada di Kabupaten Majalengka serta membuat kesepakatan bersama dengan pihak KODIM Majalengka sebagia bagian dari kepanitiaan dan instruktur pada saat pelaksanaan program berlangsung.

Sejauh ini koordinasi dilaksanakan dengan Camat, Kepala Desa, tokoh – Tokoh Masyarakat serta Ibu – ibu PKK untuk selalu berperan aktif dalam melaksanakan sosialisasi wawasan kebangsaan di wilayah masing – masing betapa penting wawasan kebangsaan dalam tatanan hidup berbangsa bernegara dalam kehidupan sehari – hari di lihat dari dinamika kehidupan saat ini.

**5. Responsivitas**

Responsivitas tentu menjadi suatu ukuran terlaksananya program ini yang dimana pelaksanaan program akan dapat berjalan terus bila mendapatkan respon yang baik, dalam hal ini respon yang didapat semua positif mendukung terlaksananya program malah menginginkan pengembangan program tidak hanya satu kali tetapi secara *continue*. Pihak sekolah yang telah menjadi sasaran program sangat amat terbantu dengan diselenggarakan program PPWK di Sekolahnya dapat dilihat dampak positif dari sebelum dan sesudah pelaksannan program selain itu pihak sekolah meninaklanjuti dengan membuat kegiatan wawasan kebangsaan ini selalu lebih di tanamkan kepada siswa – siswi.

Kunci dari program kegiatan PPWK yaitu bangai mana cara pendekatan pengajar / pemateri dan instruktur dilapangan sesuai Permendagri Nomor 71 Tahun 2012 menggunakan pendekatan yang mengutamakan pembangunan karakter bangsa, pelibatan kerjasama multipihak, keterbukaan, kreatifitas, integritas antara ucapan, pikiran dan tindakan serta penggunaan muatan lokal. Pendekatan sebagaimana dimaksud dilakukan agar menghindari bentuk – bentuk indoktrinisasi.

Program mengundang respon positif baik dari pihak sekolah maupun orang tua siswa dikarnakan ada kekhawatiran mereka atas dinamika yang berkembang sekarang ini yang tentunya Orang Tua tidak dapat mengawasi anak – anaknya bila sedang di luar rumah dan keterbatasan dari Orang Tua untuk memberikan pendidikan karakter terhadap anaknya.

Program yang bertajuk wawasan kebangsaan seharusnya dapat terus berjalan dan dikembangkan seperti halnya program KB , PNPM dan sebagainya. Pendidikan Wawasan Kebangsaan bukan hal yang baru bagi bangsa Indonesia dahulu kita kenal sebagai P4 namun pendiikan wawasan kebangsaan ini sifatnya lebih terbaharui dan sifatnya tidak setatis melainkan dinamis dengan maksud dan tujuan untuk mempertahankan empat konsensus yang sifatnya absolut bila kita ingin mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang beridiologikan Pancasila. Selain itu wawasan kebangsaan bukan suatu yang unik karena seharusnya ada dan tidak asing bagi kita semua di Negara manapun memiliki wawasan kebangsaan yang mereka pertahankan sebagai nilai sosial budaya mereka.

**6. Ketepatan**

Tujuan pelaksanaan program PPWK memberikan kontribusi yang luas kepada masyarakat melalui para pelajar dengan harapan dapat memahami, manghayati, dan mengamalkan nilai – nilai wawasan kebangsaan yang menjadi mudah dalam pedoman kehidupan sehari – hari yang mana dinamika dalam kehidupan sehari hari yang sekarang berkembang di imbangi dengan kedinamisan wawasan kebangsaan itu sendiri.

Mengacu pada Permendagri Nomor 71 Tahun 2012 pelaksanaan Pendidikan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Majalengka belum memenuhi kiteria sasaran program dikarnakan sasaran program yaitu pelajar SMA/Sederajat, namun dilihat dari segi teori pengambilan keputusan yang menjadi suatu kebijaksanaan hal ini sangat tepat menurut penyusun yang di dasari darri teori William N.Dill yaitu:

“Suatu proses dam mana pilihan – pilihan yang dibuat untuk mengubah suatu kondisi yang ada, memilih serangkaian tindakan yang paling tepat untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan , dan untuk mengurangi resiko – resiko ketidakpastian dan pengeluaran sumber – sumber dalam rangka mengejar tujuan”. (Islamy, 1984 : 23)

Dari definisi untuk mengambil sebuah keputusan menyikapi kebijakan pemerintah pusat KESBANGPOL Kabupaten Majalengka memutuskan sasaran program PPWK ialah para pelajar dengan alasan telah didepenelitiankan penyusun di atas, untuk mengurangi ketidakpastian dan pengeluran sumber – sumber dalam rangka mengejar tujuan dari program. Ini merupakan strategi dimana pengambilan keputusan merupakan sumber dari suatu kebijaksanaan menyikapi kebijakan agar dapat dilaksanakan sesuai kondisi sebenarnya di lapangan dalam hal ini Kantor Kesbangpol Kabupaten Majalengka dalam bagian otonomi daerah.

**Proposisi**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penyusun melihat bahwa impelementasi dari Kebijakan Publik tentang Program PPWK di Kabupaten Majalengaka belum opimal dilaksanakan. Berikut gambaran proposisi yang elah dilakukan dengan 6 (enam) kriteria evaluasi menurut Duun dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 5.4**

**Pembahasa Dan Temuan Di Lapangan**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Kriteria | Pembahasan | Temuan Di Lapangan |
| 1 | Efektifitas | Pencapaian sasaran program dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program PPWK itu sendiri | Pencapaian sasaran program belum maksimal.  Hambatan:  a. Fasilitas yang tidak memadai  untuk terlaksananya kegiatan  program,  b. Sumber dana yang berasal  dari APBD masih rendah,  c. Sumber Daya Manusia di  Kantor KESBANGPOL  Kabupaten Majalengka total  keseluruhan 23 pegawai. |
| 2 | Efisiensi | Usaha – usaha yang dilakukan Kantor KESBANGPOL Kabupaten Majalengka dan sistem serta prosedur dalam program PPWK. | Kantor KESBANGPOL Kabupaten Majalengka telah membangun kerjasama dengan *stakeholders* di daerah seperti :  a. Kodim Majalengka  b. Polres Majelengka  c. Kamenag Majalengka  d. Dinas Pendidikan Majalengka  e. TP PKK Kab.Majalengka  Sistem dan prosedur kegiatan PPWK dilaksanakan tiga hari tiga malam menginap di tempat pelaksanaan tersebut dengan sistem seperti asrama peserta tidak hanya mendapatkan materi – materi di dalam ruangan saja namun peserta mendapatkan materi di luar ruangan.  Peserta anak yang mempunyai tingkat kenakalan yang tinggi dibandingkan yang lain serta memilih siswa/siswi kelas dua dan tiga agar selain diharapkan bisa mempengaruhi adik teman dan adik kelas serta lingkungan dimana peserta tinggal. |
| 3 | Kecukupan | Mampu memberikan pendidikan wawasan kebangsaan kepada masyarakat | Program PPWK berperan dalam pembangunan manusia / makro dalam hal ini menghadapi Globalisasi, MEA dan juga AFTA sebagai wawasan intelektual bagi masyarakat untuk mempersatukan persatuan bangsa.  Mengevaluasi setiap kegiatan sebelumnya untuk dijadikan bahan masukan prioritas sasaran program yang lebih didahulukan untuk pelaksanaan di tahun berikutnya. |
| 4 | Peralatan | Sampai saat ini para Pelajar SMA/Sederajat menjadi peserta (sasaran program) PPWK | Sampai saat ini masih banyak pelajar yang belum jadi peserta PPWK.  MOU dengan Kodim Majalengka dan Dinas Pendidikan Majalengka pelaksanaan program PPWK.  Koordinasi dengan Camat, Kepala Desa, Tokoh – tokoh Masyarakat serta Ibu – ibu PKK untuk selalu berperan aktif dalam mengsosialisasikan wawasan kebangsaan di wilayah masing – masing betapa penting wawasan kebangsaan daam tatanan hidup berbangsa bernegara dalam kehidupan sehari – hari dilihat dari dinamika kehidupan saat ini. |
| 5 | Responsivitas | Interaksi sosial lokasi/wilayah sasaran program dengan adanya PPWK | Program mengundang respon positif baik dari pihak sekolah maupun orang tua siswa dikarnakan ada kekhawatiran mereka atas dinamika yang berkembang sekarang ini yang tentunya Orang tua tidak dapat mengawasi anak – anaknya bila sedang diluar rumah dan keterbatasan dari Orang tua untuk memberikan pendidikan karakter terhadap anaknya. |
| 6 | Ketepatan | Kontribusi program PPWK tehadap pendidikan wawasan kebangsaan dan kesesuaian pelaksaaan program kebijakan Permendagri Nomor 71 Tahun 2012 | Program PPWK sudah berkontribusi dalam pendidikan wawasan kebangsaan di Kabupaten Majelengka.  Pelaksanaan program PPWK belum sesuai dengan Permendagri Nomor 71 Tahun 2012. |

Sumber: Peneliti 2012

**KESIMPULAN**

Penyusunan penelitian mengenai Evaluasi Implementasi Kebijakan Publik Tentang Program Pemantapan Pemahaman Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Majalengka, maka berdasarkan teori kebijakan menurut William N. Dunn dapat ditarik kesimpulan melalui 6 (enam) kiteria yang dapat mengevaluasi suatu impelementasi atau pelaksanaan suatu kebijakan dapat dikatakan berhasil atau tidak.

Berdasarkan tujuan yang terdapat di latar belakang tentang mengevaluasi impelementasi program Pemantapan Pemahaman Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Majalengka, dapat disimpulkan bahwa :

1. Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Majalengka melalui program Pemantapan Pemahaman Wawasan Kebangsaan dalam upaya mengsosialisasikan Pendidikan Wawawasan Kebangsaan (PWK) belum optimal karena program sosialisasi dilaksanakan dalam rencana kerja hanya satu tahun satu kali dengan jumlah peserta / sasaran program 400 orang dan sejauh ini dari pelaksanaan program pada tahun 2010 sampai saat ini taun 2013 berjumlah 1.600 orang peserta sedangkan jumlah penduduk Kabupaten Majalengka per 2013 berjumlah 1.180.774 jiwa sehingga masih banyak masyarakat yang belum mendaptkan kejelasan

dari pemahaman pentingnya Wawasan Kebangsaan dalam membangun karakter baik moral maupun intelektual.

1. Usaha – usaha yang dilakukan Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Majalengka membangun kerjasama dengan *stakeholders* seperti Kasi – Kasi dan Kasubag TU dari pihak internal dan pihak external seperti Kodim 0617 Majalengka dan Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka serta pendukung kegiatan dari Polres Majelengka, Kemenag Kabupaten Majalengka, dan PKK Kabupaten Majalengka, baik sebagai instruktur dan pemateri sesuai dengan materi yang disampaikan untuk memenuhi kekurangan Sumber Daya Manusia di Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Majalengka.
2. Melalui Program PPWK ini di harapkan dapat mencegah kenakalan remaja, mencegah paham – paham yang dapat merusak integritas Bangsa Indonesia dan mempersiapkan diri pada khususnya pelajar di Kabupaten Majalengka dan masyarakat luas (publik) untuk mempersipkan diri menghadapi Globalisasi, MEA dan AFTA untuk dapat berdaya saing serta memiliki pondasi yang kuat mempertahankan sistem sosial budaya kita.
3. Masih bayak masyarakat yang belum mendapatkan pemahaman wawasan kebangsaan bentuk sosialisasi selain program PPWK sampai saat ini masih jarang sekali kita temui dan bila ada pun hanya ada di wilayah kota belum sampai ke wilayah – wilayah Desa.
4. Dalam penelitian ini penyusun merasa belum cukup menghimpun data interaksi masyarakat secara luas tentang program PPWK yang sejauh ini dilaksanakan dikarnakan kekurangn penyusun itu sendiri, penyusun menghimpun data respon terhadap tempat yang pernah dijadikan sasaran program sadah dapat dibayangkan sebelumnya respo yang akan didapat pasti baik karna tempat tersebut mempunyai tujuan yang sama akan hal Pendidikan Wawawasan Kebangsaan. Namun dari keterangan yang penyusun dapat dari informen dengan ada kegiatan ini terbantu dan melihat interaksi dan perubahan peserta pada saat sebelum dan sesudah pelaksanaan kegiatan PPWK.
5. Kontribusi Pendidikan Wawasan Kebangsaan dalam memberikan pemahaman wawasan kebangsaan kepada sasaran program yang mana ditindaklanjuti ke masyarakat luas belum optimal dilaksanakan mengacu pada Permendagri Nomor 71 Tahun 2012 namun pelaksanaan program dalam mengimplementasikan Permendagri tersebut sudah berjalan dan tepat sasaran.

**DAFTAR PUSTAKA**

Alfonsus Sirait. 1991. *Manajemen*. Jakarta: P.T Gelora Aksara.

Dunn, William N. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik edisi kedua. Yogyakarta : Gajah Mada Universy Prees.

Edward A. Suchman. 1987 *Evaluative Research*: *Principles and Practicein Public Service and Social Action Program*  Dalam Wirawan, Evaluasi (Teori,Model, Standar, Dan Profesi). Jakarta: Rajawali Pers.

Islamy, M. Irfan.1984. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

Judistira K. Garna. 2009. *Dasar dan proses penelitian Sosial (Merencanakan, Melaksanakan Dan Menulis Hasil Penelitian)*. Bandung: Primaco Akademika and Judustira Garna.

Kaelan. 2010. *Pendidikan Pancasila (Edisi Reformasi)*. Yogyakarta: Paradigma.

Kusmayadi. D. 2009. *Diktat Sistem Administrasi Negara Indonesia*. Majalengka: FISIP-UNMA.

Leo Agustino. 2006. *Dasar – Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Lexy J. Maleong. 2007. *Metode Pelelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya

Muchsin dan Fadillah Putra. 2002. *Hukum dan Kebijakan Publik*. Malang: Averroes.

Nurdiana. B. 2010. *Diktat Sekilas Tenang Administrasi Organisasi Manajemen*. Majalengka: FISIP-UNMA

Peter H. Rossi & Howard E. Freeman, 1985 dan Evert Vedung, 2000. Dalam Wirawan, Evaluasi (Teori,Model, Standar, Dan Profesi). Jakarta: Rajawali Pers

Subarsono, AG. 2005. Analisis Kebijakan Publik *(Konsep, Teori dan Aplikasi).* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kantitatif, Kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta.

Tangkilisan, Hesel Nogi S. 2003. *Kebijakan Publik yang Membumi (konsep, strategis&kasus)*. Yogyakarta: Lukman Offset.

Wirawan. 2011. *Evaluasi (Teori, Model, Standar, Dan Profesi*). Jakarta: Rajawali Pers

Wirman Burhan. 2012. *Pendidikan Kewarganegaraan Pancasila Dan Undang-Undang Dasar 1945*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.